LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
KOMISI IX DPR RI KE KOTA BITUNG
PADA RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023-2024
TANGGAL 15 – 19 JULI 2024

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI selalu memantau dan mengawasi berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR RI adalah melalui kunjungan kerja. Sedangkan di dalam Pasal 60 ayat (3) huruf f juga menyebutkan bahwa Komisi dapat mengadakan kunjungan kerja di masa reses yang hasilnya akan dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti. Untuk itu, Komisi IX DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja secara paralel ke 3 (tiga) daerah di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Kota Bitung, Kota Manado, dan Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja, Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan serta pengawasan obat dan makanan, mengharapkan mendapatkan masukan secara langsung baik dari Pemerintah Daerah, mitra kerja, maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN dan juga untuk memonitor pelaksanaan program-program instansi/badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di daerah tujuan kunjungan kerja. Selain itu, kunjungan kerja juga bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI.

I.2 Dasar Kegiatan

a. Keputusan Pimpinan DPR RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja berkelompok dalam Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.
b. Keputusan Rapat Internal Komisi IX DPR RI tanggal 14 Mei 2024 pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023 - 2024.

I.3 Maksud dan Tujuan

a. Menjalankan fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI.
b. Mendapatkan informasi realisasi program dan anggaran yang dibiayai APBN.
c. Memetakan permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan program-program instansi/badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di Kota Bitung.

d. Menyerap aspirasi masyarakat Kota Bitung secara umum terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI.

I.4 Peserta

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Kota Bitung dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ibu **Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si.** Adapun susunan lengkap anggota rombongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI sebagaimana terlampir.

(nama terlampir)

I.5 Kegiatan Kunjungan Kerja

Dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Kota Bitung telah dilakukan pertemuan dengan Walikota Bitung dan jajaran Pemerintah Kota Bitung, dan peninjauan ke RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Kota Manado dengan mitra kerja Komisi IX dan instansi terkait bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pengawasan obat dan makanan, dan jaminan sosial yaitu:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung;
2. Kepala Ketenagakerjaan Kota Bitung;
3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara;
4. Perwakilan Balai Besar POM di Manado.
5. Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara);
6. Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi-Maluku;
7. Perwakilan BP3MI Sulawesi Utara;
8. Direktur RSUD Kota Bitung;
9. Kepala Balai Latihan Kerja Bitung

II. GAMBARAN UMUM DAERAH

II.1 Gambaran Umum

Kota Bitung merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara dengan luas 313,51 km2 atau sekitar 2,26% dari total luas Provinsi Sulawesi Utara. Wilayah Kota Bitung secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat (bagian yang terletak di pulau utama Sulawesi) dan timur (Pulau Lembeh) yang dipisahkan oleh selat lembeh.

Kota Bitung secara geografis berbatasan dengan Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara dan laut maluku di sebelah utara, berbatasan dengan Laut Maluku di sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara di sebelah barat, berbatasan dengan Laut Maluku di sebelah timur.

Wilayah Kota Bitung secara administratif terbagi menjadi delapan kecamatan, yaitu Kecamatan Matuari, Kecamatan Girian, Kecamatan Ranowulu, Kecamatan Madidir, Kecamatan Maesa, Kecamatan Aertembaga, Kecamatan Lembeh Selatan, dan Kecamatan Utara. Kecamatan Ranowulu adalah kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Bitung dengan luas 157,57 km2 atau sekitar 50,26% dari seluruh luas wilayah Kota Bitung.

II.2 Gambaran Umum Kependudukan dan Kesehatan Kota Bitung

- Kependudukan

Dalam Statistik Kota Bitung yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2023, menyatakan bahwa Kota Bitung sebagai salah satu daerah yang mempunyai potensi untuk fase bonus demografi, sehingga potensi ini harus dioptimalkan. Ini menjadi tantangan jika fasilitas pendukung tidak memadai, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, maupun lapangan kerja. Selain itu masih tingginya usia balita perlu mendapat perhatian agar laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan.

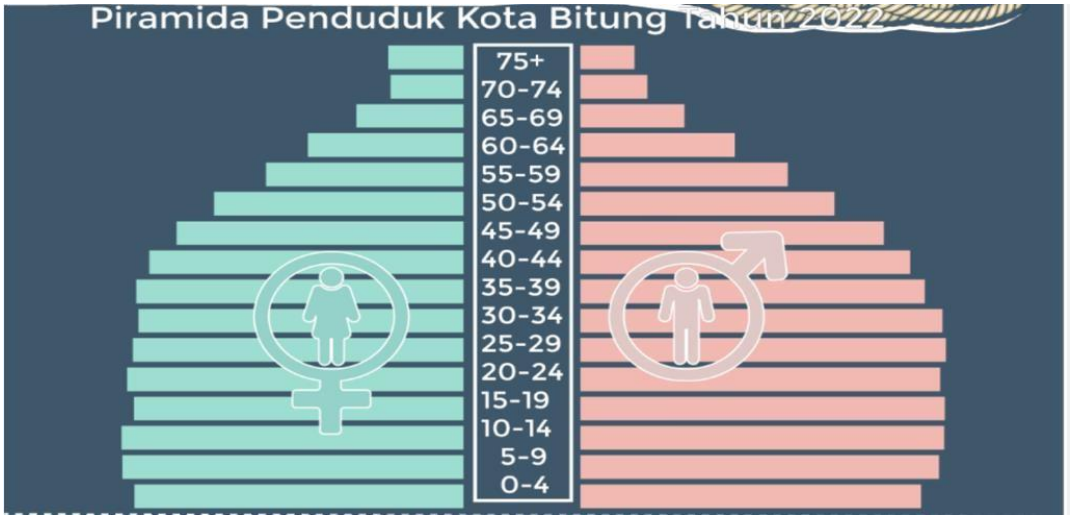

Selain itu, permasalahan penyebaran penduduk juga harus menjadi perhatian, karena saat ini kepadatan penduduk condong lebih tinggi di daerah yang akses ke pusat perekonomian dan fasilitas umum lainnya lebih mudah.

– Kesehatan

Fasilitas layanan kesehatan juga menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung pembangunan manusia sehat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kota Bitung dalam upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sampai tahun 2022 menurut data Badan Pusat Statistik, mempunyai 4 rumah sakit yaitu RSUD Manembo Nembo Bitung, RSAL dr Wahyu Slamet, RSUD Pratama Bitung, dan RS Budi Mulia. Sedangkan untuk klinik/balai kesehatan sebanyak 14,9 puskesmas dimana 4 diantaranya adalah merupakan puskesmas rawat inap.

Untuk tenaga medis, Kota Bitung menurut data tahun 2022 memiliki 70 orang dokter, 95 orang bidan, perawat sebanyak 160 orang, ahli gizi sebanyak 26 orang, dan tenaga farmasi 18 orang.

Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat Kota Bitung, tahun 2022, sebanyak 81,82% penduduk sudah memiliki jaminan kesehatan, 0,07% adalah peserta Jamkesda, 4,63% merupakan pemilik jaminan kesehatan dari kantor/perusahaan, sementara 0,09% sisanya adalah peserta asuransi swasta. Dari data tersebut baru sebanyak 39,06% penduduk yang berobat jalan

menggunakan jaminan kesehatan, hal ini menunjukkan masih rendahnya pemanfaatan jaminan kesehatan oleh masyarakat.

Untuk angka kelahiran tahun 2022 menurun 29,91% menjadi 2.535 bayi, dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 3.617 bayi yang lahir.

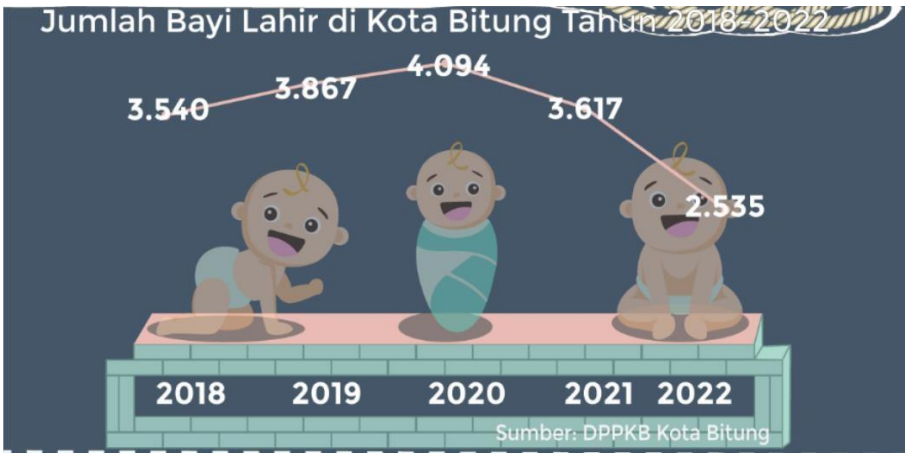

Sedangkan untuk program Keluarga Berencana, tahun 2022 terus diupayakan guna mencegah angka kehamilan yang tidak diinginkan sekaligus memberikan jarak kelahiran untuk mengurangi risiko kematian bayi. Selain itu, proses kelahiran juga perlu menjadi perhatian dengan ketersediaan penolong kesehatan yang kompeten serta fasilitas kesehatan yang memadai untuk membantu proses

kelahiran agar berlangsung secara aman dan lancar. Sebagai catatan, pada tahun 2022 sebanyak 96,84% proses kelahiran sudah dilakukan di fasilitas kesehatan.

II.3. Gambaran Umum Ketenagakerjaan Kota Bitung

Penduduk Usia Kerja (PUK), terdiri atas penduduk Angkatan kerja dan Angkatan Bukan Kerja yang berusia 15 tahun ke atas. PUK setidaknya mampu melihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Penduduk usia kerja ini menunjukkan jumlah penduduk di usia produktif yaitu 15-65 tahun.

Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih, mereka terdiri dari Angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja. Jumlah penduduk usia kerja di Kota Bitung tahun 2022 mencapai 170.370 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 105.407 orang merupakan penduduk berkategori Angkatan kerja dan sebanyak 64.953 orang termasuk kategori bukan Angkatan kerja. Kategori Angkatan kerja mencakup penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka, sedangkan kategori bukan Angkatan kerja mencakup kegiatan bersekolah, mengurus rumah tangga dan aktivitas lainnya. Dari 105.407 orang Angkatan kerja tersebut terdiri dari 96.397 orang berstatus bekerja dan 9.020 orang berstatus pengangguran. Sementara untuk bukan angkatan kerja sebanyak 64.953 orang yang terdiri dari 42.050 orang mengurus rumah tangga, 13.741 orang bersekolah, dan 9.162 orang melakukan kegiatan lainnya.

Berdasarkan pendekatan tiga sektor utama yaitu primer (pertanian), sekunder (industri), dan tersier (jasa), sektor jasa-jasa atau tersier ini mendominasi penyerapan tenaga kerja di Kota Bitung. Selama tahun 2022 sektor tersier berhasil menyerap sebanyak 61,50 persen penduduk yang bekerja atau sebanyak 59.280 orang, Sedangkan penyerapan tenaga kerja di sektor sekunder/industri (industri, konstruksi dan LGA) sebanyak 28,24 persen (27.221 orang) tenaga kerja di tahun 2022. Selanjutnya sektor primer/pertanian hanya mampu menyerap 9.896 orang tenaga kerja atau sekitar 10,27 persen penduduk yang bekerja.

Menurut Pendidikan tertinggi yang ditamatkan, penduduk yang bekerja paling banyak berpendidikan SMA/sederajat yakni sebesar 45,04 persen, sementara yang berpendidikan perguruan tinggi sebanyak 18,95 persen. Untuk kelompok pengangguran, didominasi Pendidikan SMA/Sederajat yaitu sebesar 50,25 persen, untuk yang SD kebawah sebanyak 25,09 persen.

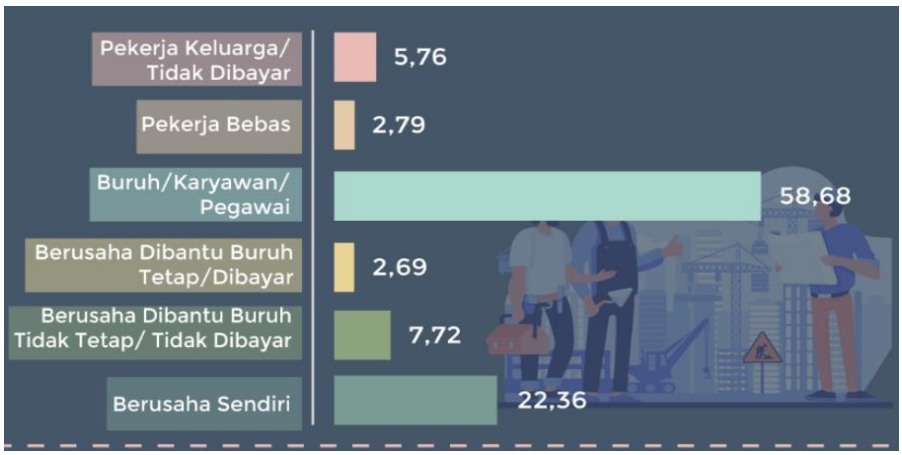

Menurut status pekerjaan, penduduk yang bekerja sebagian besar berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai di Kota Bitung tahun 2022 sekitar 58,68 persen dari total penduduk yang bekerja. Status pekerjaan yang terbanyak kedua yaitu berusaha sendiri sebanyak 22,36 persen. Sedangkan pekerja yang berstatus pekerja bebas hanya sekitar 2,79 persen.

Dilihat menurut jenis kelamin, penduduk yang bekerja didominasi oleh laki laki, yaitu sebanyak 65,04 persen dari total penduduk yang bekerja. Namun ini juga menunjukkan bahwa persentase pekerja wanita juga cukup besar yaitu mencapai 34,96 persen.

Indikator yang sering digunakan dalam melihat kondisi ketenagakerjaan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Pengangguran Terbuka didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebagai persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK Kota Bitung tahun 2022 mengalami penurunan 0,44 poin jika dibandingkan tahun 2021 yaitu dari 62,22 menjadi 61,88. Di sisi lain Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan dari 9,96 di tahun 2021 menjadi 8,56 di tahun 2022. Angka TPT 8,56 menunjukkan bahwa dari 100

penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa di Kota Bitung, terdapat sekitar 8-9 orang merupakan pengangguran. Sementara itu Tingkat Setengah Menganggur Kota Bitung (mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan) tahun 2022 juga mengalami penurunan dibanding 2021, yaitu dari 4,75 persen menjadi 3,99 persen di tahun 2022.

III. HASIL KUNJUNGAN KERJA

BIDANG KESEHATAN

Indikator kesehatan Kota Bitung untuk angka harapan hidup sudah lebih baik, yaitu pada umur 74,22 tahun pada tahun 2023, untuk prevalensi stunting juga sudah menurun pada tahun 2023 menjadi 152.

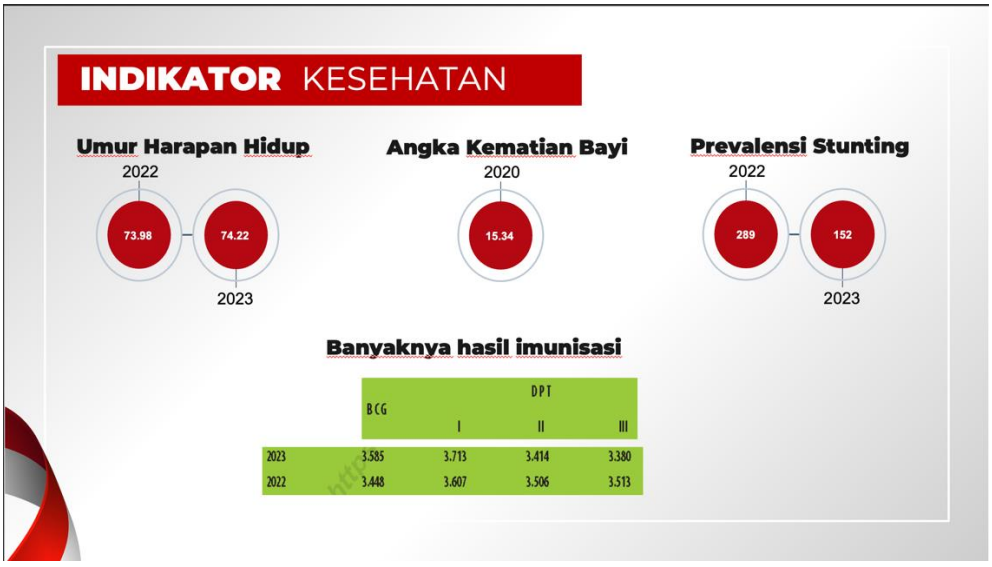

Dalam hal Jaminan Kesehatan, cakupan kepesertaan Kota Bitung, untuk peserta aktif sudah mencapai 100,80% dan sudah mencapai UHC.

Tahun	Jumlah Penduduk	Cakupan Peserta	% Cakupan Peserta	Peserta Aktif	% Peserta Aktif
1	*2*	*3*	*4=3/4*	*5*	*6=5/2*
2022	227.389	248.469	**109,27%**	225.030	**98,96%**
2023	228.006	254.898	**111,79%**	223.497	**98,02%**
2024 (Juni)	219.063	253.723	**115,82%**	221.011	**100,89%**

Adapun cakupan peserta berdasarkan segmen per 30 Juni 2024 tertinggi di segmen PBI JK sebesar 108.120 jiwa (42,6%). Rincian cakupan kepesertaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Segmen	Jumlah Peserta	% Jumlah Peserta	Peserta Aktif
1	2	3=2/Jlh Pst	4
PBIJK	108.120	**42,61%**	97.324
PBPU Pemda	65.563	**25,84%**	54.843
PPU BU	40.132	**15,82%**	32.991
PPU PN	25.420	**10,02%**	24.366
PBPU	9.811	**3,87%**	7.015
BP	4.677	**1,84%**	4.472
Jumlah	**253.723**	**100,00%**	**221.011**

Namun masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan di Kota Bitung, antara lain:

a. ketersediaan anggaran yang belum mencukupi untuk kebutuhan iuran peserta JKN (segmen peserta PBPU) pemda, Iuran Wajib PN Daerah dan PPNPN Daerah) pada tahun anggaran berjalan.
b. Ketidapatuhan pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh pekerja termasuk buruh harian lepas.

Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan adalah 36 FKTP. Untuk ketersediaan FKTP per kecamatan di Kota Bitung sebagai berikut:

No	Kecamatan		FKTP Kerja Sama					
		Puskesmas	Klinik Pratama	Klinik POLRI	Klinik TNI	TPMD	TPMDG	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
1	Lembeh Selatan	1	-	-	-	-	-	1
2	Madidir	1	1	-	-	5	2	9
3	Ranowulu	1	-	1	-	-	-	2
4	Aertembaga	2	-	1	-	1	1	5
5	Matuari	1	1	-	-	1	1	4
6	Girian	1	3	-	1	3	1	9
7	Maesa	1	-	-	1	2	1	5
8	Lembeh Utara	1	-	-	-	-	-	1
TOTAL		9	5	2	2	12	6	36

Sedangkan untuk kecukupan dokter dalam memberikan pelayanan kepada peserta

JKN Kota Bitung adalah dimana jumlah dokter umum di FKTP adalah 93 orang dan perbandingannya adalah 1 : 2.078 peserta. Hal ini menunjukkan bahwa total jumlah dokter umum di Kota Bitung tersebut relatif cukup untuk memberikan pelayanan kepada peserta JKN yang terdaftar di FKTP nya.

Rata-rata kunjungan ke fasilitas kesehatan pada tahun 2023 mencapai 476 ribu kunjungan, dan pada tahun 2024 selama periode Januari - Juni 2024 sebanyak 240 ribu kunjungan atau 1.389 kunjungan per hari.

Biaya pelayanan kesehatan tahun 2023 menunjukkan peningkatan. Total biaya pelayanan kesehatan tahun 2023 mencapai Rp.140 miliar (meningkat 37 miliar rupiah dari tahun 2023).

Tingkat Pelayanan	Beban		
	2022	2023	Jan- Jun 2024
Rawat Jalan Tingkat Pertama	21.643.450.118	24.224.179.142	13.859.071.920
Rawat Inap Tingkat Pertama	249.800.000	221.600.000	74.800.000
Rawat Jalan Tingkat Lanjut	31.503.466.262	36.903.420.402	19.164.354.613
Rawat Inap Tingkat Lanjut	49.991.081.600	78.694.815.585	43.916.364.000
Promotif Preventif	378.360.000	649.605.000	340.460.000
Total Kota Bitung	**103.766.157.980**	**140.693.620.129**	**77.355.050.533**

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pengelolaan klaim di FKRTL adalah:

- masih adan rumah sakit yang belum menyelenggarakan pelayanan obat kronis yang menyebabkan peserta JKN yang seharusnya memperoleh obat 30 hari dan melakukan kunjungan ke FKRTL 1 kali/bulan, harus kembail ke rumah sakit kurang lebih 4 kali/bulan untuk mengambil obat.
- untuk pengelolaan klaim FKRTL, belum seluruh FKRTL melakukan implementasi digitalisasi klaim dengan elektronik medical record melainkan pengajuan berkas klaim dilakukan secara manual.

Sementara untuk pengawasan obat dan mkanan, saat ini Kota Bitung dan Balai Besar POM di Manado bekerjasama dan memfokuskan pada pengawasan sarana produksi dan distribusi. Kegiatan tersebut pada tahun 2023 telah dilakukan dengan sasaran usaha dengan jenis sarana produk pangan, distribusi pangan, distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian, obat tradisional, dan suplemen kesehatan serta

kosmetik.

No	Jenis Sarana	Memenuhi Ketentuan	Tidak Memenuhi Ketentuan	Total Sarana
1	Produksi Pangan MD)	11	1	12
	Produksi Pangan (IRTP)	4	1	5
2	Distribusi Pangan	54	0	54
3	Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	18	5	23
4	Distribusi Obat Tradisional	0	2	2
5	Distribusi Suplemen Kesehatan	0	0	0
6	Distribusi Kosmetik	3	0	3

Saat ini, tantangan bidang kesehatan di Kota Bitung adalah:

1. Fasilitas layanan kesehatan yang terakreditasi;
2. SDM Kesehatan terutama dokter spesialis belum cukup; dan
3. Anggaran kesehatan.

BIDANG KETENAGAKERJAAN

Indikator ketenagakerjaan Kota Bitung Penduduk Usia Kerja (PUK), terdiri atas penduduk Angkatan kerja dan Angkatan Bukan Kerja yang berusia 15 tahun ke atas. PUK setidaknya mampu melihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Penduduk usia kerja ini menunjukkan jumlah penduduk di usia produktif yaitu 15-65 tahun.

Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun dan lebih, mereka terdiri dari Angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja. Jumlah penduduk usia kerja di Kota Bitung tahun 2022 mencapai 170.370 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 105.407 orang merupakan penduduk berkategori Angkatan kerja dan sebanyak 64.953 orang termasuk kategori bukan Angkatan kerja. Kategori Angkatan kerja mencakup penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka, sedangkan kategori bukan Angkatan kerja mencakup kegiatan bersekolah, mengurus rumah tangga dan aktivitas lainnya.

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN

Tingkat Pengangguran Terbuka

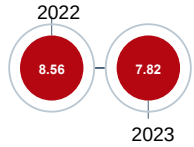

Penyerapan tenaga kerja

Jumlah Penduduk 15 tahun keatas yang bekerja (2023)

Status Pekerjaan Utama *Main Employment Status*	Laki-Laki *Male*	Perempuan *Female*	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri *Own account worker*	20.102	8.520	28.622
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar *Employer assisted by temporary worker/ unpaid worker*	3.485	1.729	5.214
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar *Employer assisted by permanent worker/ paid worker*	1.849	482	2.331
Buruh/Karyawan/Pegawai *Employee*	42.758	17.322	60.080
Pekerja bebas *Casual worker*	3.523	910	4.433
Pekerja keluarga/tak dibayar *Family worker/unpaid worker*	1.310	3.301	4.611
Jumlah/ *Total*	**73.027**	**32.264**	**105.291**

https://bitungkota.bps.go.id

Dari 105.407 orang Angkatan kerja tersebut terdiri dari 96.397 orang berstatus bekerja dan 9.020 orang berstatus pengangguran. Sementara untuk bukan angkatan kerja sebanyak 64.953 orang yang terdiri dari 42.050 orang mengurus rumah tangga, 13.741 orang bersekolah, dan 9.162 orang melakukan kegiatan lainnya.

Berdasarkan pendekatan tiga sektor utama yaitu primer (pertanian), sekunder (industri), dan tersier (jasa), sektor jasa-jasa atau tersier ini mendominasi penyerapan tenaga kerja di Kota Bitung. Selama tahun 2022 sektor tersier berhasil menyerap sebanyak 61,50 persen penduduk yang bekerja atau sebanyak 59.280 orang, Sedangkan penyerapan tenaga kerja di sektor sekunder/industri (industri, konstruksi dan LGA) sebanyak 28,24 persen (27.221 orang) tenaga kerja di tahun 2022. Selanjutnya sektor primer/pertanian hanya mampu menyerap 9.896 orang tenaga kerja atau sekitar 10,27 persen penduduk yang bekerja.

Jumlah Pekerja Migran Indonesia sebanyak 9 PMI dalam kurun waktu Januari s/d Juli 2024 baik secara fprmal maupun informal dengan daerah tujuam Singapura, Hongkong, Jepang, Salomon dan Guyana

PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)

REKAPITULASI PENEMPATAN PMI SELANG BULAN JANUARI s.d JULI 2024					
NO	NEGARA	SKEMA	FORMAL	INFORMAL	JUMLAH
1	Singapura	P3MI/Mandiri	-	2	2
2	Hongkong	P3MI	-	2	2
3	Jepang	SSW	3	-	3
4	Salomon	Mandiri	1	-	1
5	Guyana	Mandiri	1	-	1
JUMLAH TOTAL			5	4	9

Jumlah penduduk di Kota Bitung berdasarkan BPS 2024 sebesar 234.970 Jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 713 Jiwa/^{2}. Sampai dengan 12 Juli 2024 sebesar 74,70%. Coverage kepesertaan pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebantal 71.388 Tenagakerja dari total potensi sebanyak 95.567 Tenagakerja. Dengan perincian Penerima Upah sebanyak 36.979 jiwa dari potensi tenagakerja sejumlah 50.642 tenagakerja. Bukan Penerima Upah sebanyak 32.721 tenagakerja dengan potensi sebesar 38.535 tenagakerja. Jasa Konstruksi sebanyak 1.688 tenagakerja dengan potensi sebanya 6.390 tenagakerja. Dan jumlah perusahaan yang terdaftar sebanyak 484 perusahaan.

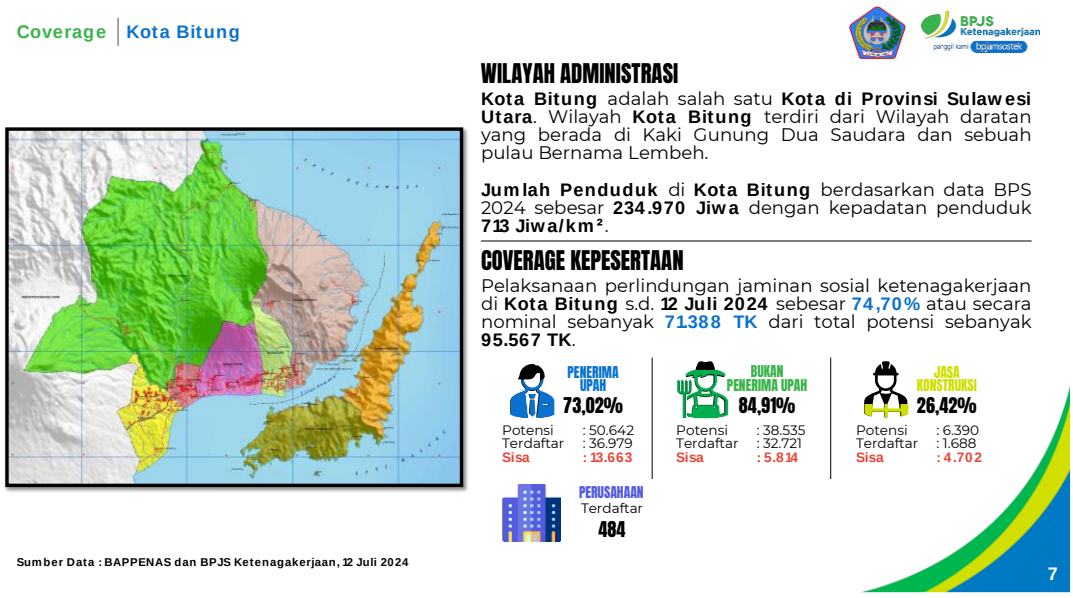

IV. REKOMENDASI

1. Komisi IX DPR RI mendesak Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh dengan memastikan kecukupan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan, dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, sehingga ada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta JKN.

2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah guna pemetaan dan memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan khususnya dokter spesialis khususnya di Kota Bitung.

3. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk terus melakukan persiapan dan monitoring bagi seluruh rumah sakit untuk pelaksanaan program Kelas Rawat Inap Standar bagi setiap rumah sakit agar sesuai dengan Perpres 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dalam rangka diversifiksi sektor lapangan kerja di Kota Bitung

V. PENUTUP

Demikian laporan Komisi IX DPR RI dalam rangka kunjungan kerja reses ke Pemerintah Kota Bitung ini kami sampaikan. Atas perhatian dan jawaban dari Pemerintah Kota Bitung serta dukungan dari semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Juli 2024
TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI KE KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA

KETUA TIM,
Ttd.

DR. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
A-425